

APLIKASI "STRATEGIC PLANNING" DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA¹

Yeremias T. Keban

Abstract

To date, there have been no regional development theories regarded as the most appropriate and valid in guiding and determining regional measures. Moreover, Indonesia has a very specific geographical, social, cultural and political backgrounds which could potentially complicate and constrain the development efforts. Such diversities and lack of valid regional theories require an innovative thought in regional development intervention. The application of Strategic Planning as an academic exercise in the context of regional development in Kabupaten Fakfak is an innovative alternative to overcome such complexities. Through the Strategic Planning approach, ten strategic sectors have been identified. Those sectors need to be incorporated into and developed in the Kabupaten long-term planning.

Keywords: regional development, strategic planning

Latar Belakang

Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) sehingga tidak jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Meskipun demikian, masih ada penduduk pada beberapa daerah, seperti di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang belum begitu tersentuh oleh pembangunan, yang kemudian mengakibatkan

munculnya perasaan "terabaikan" di daerah (Hill & Weidemann, 1991). Karena itu, dalam GBHN 1993 telah dinyatakan bahwa pembangunan daerah pada masa mendatang diarahkan untuk mengatasi keterpencilan, keterisolasian, keterbelakangan, serta difokuskan pada pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebagai perwujudan dari Wasasan Nusantara.

Sebagai bagian dari Kawasan Timur Indonesia, propinsi Irian Jaya,

¹ Data yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan atas Laporan Ringkas "Rencana Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT) pada Pengembangan Wilayah Fakfak Propinsi Irian Jaya", 1997.

termasuk Kabupaten Fakfak, masih tertinggal sebagai akibat dari berbagai faktor antara lain tantangan alam fisik yang menimbulkan keterisolasian, jumlah penduduk yang relatif jarang dengan kepadatan yang sangat kecil, penyebarannya tidak merata, latarbelakang suku dan adat istiadat yang berbeda-beda dan khas (tantangan sosial budaya), dan sistem ekonomi yang masih sederhana dan terbatas. Kegagalan pembangunan di Kawasan Timur tersebut secara tidak langsung mempertanyakan validitas dan efektivitas strategi pembangunan yang diterapkan di Indonesia selama ini, khususnya strategi yang lebih cenderung "center-down" atau "top-down", dan bersifat fungsional dengan menekankan ekspor, pemanfaatan teknologi tinggi dan "capital intensive". Komentar bahwa strategi ini lebih cenderung mementingkan kepentingan kapitalis, mengarah ke eksploitasi, alienasi, dan konflik mungkin tidak sepenuhnya salah (Stilwell, 1995). Kegagalan di Indonesia nampaknya sama dengan pengalaman beberapa negara berkembang antara lain Brasil, Chili, Peru, dan Nigeria. Kegagalan ini mungkin juga disebabkan oleh kondisi fisik Indonesia yang sangat khas (Azis, 1991), sementara teori-teori pembangunan regional lebih banyak didasarkan atas pengalaman negara maju yang bersifat kontinental.

Siapakah yang mengambil manfaat dari pembangunan yang ada, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah kaum elit yang tinggal pada daerah maju atau perkotaan bersedia memberikan bantuan terhadap kaum miskin yang tinggal pada daerah

tertinggal atau pedesaan, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara memuaskan bila strategi *center-down* masih tetap mendominasi pembangunan regional di Indonesia.

Saran untuk menggunakan pendekatan yang bersifat "bottom-up" telah dimulai sejak Pelita III. Tetapi keberhasilan strategi tersebut nampak sulit direalisasikan karena kebijakan yang membantu kaum miskin yang merupakan mayoritas negara berkembang relatif mahal, sementara memotivasi kaum miskin dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka bukan hal yang mudah dilaksanakan. Syarat-syarat keberhasilan dari strategi tersebut nampak berat, meskipun strategi ini seringkali dipromosikan para ahli termasuk tokoh pembangunan regional sendiri (lihat Friedmann dan Weaver, 1979). Pembangunan yang selama ini bersifat "functional" telah disarankan untuk dialihkan ke yang bersifat "territorial", sehingga pembangunan yang ada merupakan hasil keputusan masyarakat sendiri dan didasarkan kepada kepentingan, potensi, dan karakteristik lokal. Contoh pembangunan yang berdasarkan karakteristik lokal ini dapat dilihat pada strategi pembangunan "agropolitan" (Friedman & Douglas, 1978), dan "integrated regional development" (Rondinelli & Ruddle, 1978).

Bila kita kaitkan karakteristik daerah Irian Jaya yang sangat khas, pendekatan yang bersifat "territorial" akan lebih ideal, artinya pembangunan

di Irian Jaya dilakukan dengan memperhatikan kondisi alam dan karakteristik masyarakatnya. Padahal kita menyadari bahwa penduduknya sendiri masih memiliki tingkat kesadaran yang sangat rendah untuk maju. Mengajak, apalagi merubah masyarakat untuk menganut suatu yang baru bukanlah hal yang mudah. Karena itu tidaklah mengherankan kalau "membangun di Irian Jaya" jauh lebih populer dari pada "membangun Irian Jaya" itu sendiri. Yang pertama lebih berkaitan dengan pendekatan fungsional dan mudah dilakukan oleh orang luar Irian Jaya, sementara yang terakhir menuntut inisiatif dan kreatif orang Irian Jaya sendiri, suatu kondisi yang masih sulit dilakukan pada saat sekarang.

Kesulitan yang paling utama dihadapi dalam pembangunan regional dewasa ini adalah mencari teori yang paling tepat untuk digunakan sebagai penuntun kebijakan pembangunan regional. Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang ada pada teori-teori pembangunan regional sendiri (lihat Gore, 1984). Demikian pula, mencari teori pembangunan regional yang tepat untuk disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Irian Jaya bukanlah hal yang mudah.

Tulisan ini mencoba memberikan tawaran untuk memanfaatkan pendekatan khusus yaitu "strategic planning" bagi pembangunan regional di Irian Jaya pada umumnya dan Kabupaten Fakfak pada khususnya, dengan mengajukan sektor-sektor pembangunan yang bersifat strategis.

Masalah dan Tujuan

Kabupaten Fakfak yang terletak di bagian barat dari Irian Jaya, terkenal tidak saja sebagai daerah yang masih terpencil tetapi juga sebagai daerah yang berpenduduk masih jarang. Kabupaten Fakfak menduduki posisi pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang kedua setelah Kabupaten Sorong. Sumbangan terbesar PDRB berasal dari sektor pertambangan yang berada di Kecamatan Mimika Timur. Akan tetapi, dengan terbentuknya Kabupaten baru Timika (meliputi kecamatan Mimika Barat, Mimika Timur dan Agimuga) pada tahun 1996, yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak, maka PDRB Kabupaten menurun drastis. Pembentukan Kabupaten baru tersebut telah memberikan tantangan yang berat yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten secara cepat dan berkelanjutan tanpa sektor pertambangan. Bagaimana Kabupaten tersebut dapat hidup, bertahan dan berkembang di masa mendatang setelah terpisah dari Timika, merupakan masalah jangka panjang yang harus diatasi oleh Pemda Fakfak. Dan perumusan strategi-strategi pembangunan regional untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut merupakan tujuan dari bahasan ini.

Pendekatan Pembangunan Regional

Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan untuk membangun Irian Jaya, termasuk Kabupaten Fakfak,

adalah menerapkan "strategic planning". Secara tidak langsung strategic planning telah dipromosikan dalam Integrated Regional Development buah pikiran Rondinelli dan Ruddle (1978), suatu pendekatan "bottom-up" yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam pembangunan regional.

Integrated Regional Development atau lebih dikenal sebagai "the USAID strategy" bertujuan menciptakan suatu sistem produksi dan perdagangan yang bersifat "integrated" dengan mendorong terciptanya "spatial linkages" seperti jaringan interaksi fisik, ekonomi, teknologi, sosial, dan administrasi. Pemukiman dalam besaran tertentu, yang memiliki spesialisasi fungsi-fungsi sosial dan ekonomi yang khas, harus dikaitkan antara satu dengan yang lain melalui jaringan interaksi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diterapkan apa yang disebut "transformational approach" yang meliputi 8 (delapan) prinsip, antara lain:

1. Membangun berdasarkan pada sumberdaya, lembaga-lembaga, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang ada
2. Melibatkan masyarakat lokal yang akan dipengaruhi oleh transformasi dan perubahan, kedalam perencanaan dan implementasi
3. Mengadaptasikan teknologi, pelayanan dan fasilitas-fasilitas modern terhadap kondisi lokal
4. Harus mendorong spesialisasi dalam kegiatan produksi dan perdagangan berdasarkan keuntungan komparatif
5. Menggunakan metode-metode

perubahan yang tepat, murah, dan dapat diterima secara kultural untuk merangsang "demonstration effects" sehingga metode-metode yang terbukti sukses dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat

6. Merencanakan perubahan terhadap lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang tidak produktif dan yang tidak dapat diadaptasikan
7. Menciptakan, melalui perencanaan yang berdasarkan "strategic intervention", prakondisi bagi transformasi dan perubahan dalam struktur dan proses sosial, teknis, politik, ekonomi, dan administrasi, dan dalam elemen-elemen struktur spasial,
8. Menciptakan suatu proses perencanaan yang fleksibel, incremental, dan adaptif, yang mendukung eksperimentasi dan penyesuaian.

Pendekatan ini memberikan suatu implikasi bahwa membangun suatu wilayah harus dilakukan secara strategis dan terpadu dengan memperhatikan kondisi internal, dan eksternal.

Sementara itu, strategic planning memberikan gambaran kedepan tentang bagaimana suatu lembaga dapat berjalan menuju tujuan, sesuai misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal, dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungan. Bryson (1988: 48) memberikan 8 langkah pokok yang terdiri atas:

1. Merintis dan meminta persetujuan

- terhadap suatu proses perencanaan strategis. Dalam hal ini dilakukan negosiasi dengan para pembuat keputusan atau pemimpin kunci (termasuk kelompok, unit-unit tertentu atau organisasi) baik dari dalam maupun dari luar organisasi, sehingga diperoleh dukungan dan komitmen dari mereka.
2. Mengidentifikasi mandat organisasi. Suatu mandat berisi apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh organisasi.
 3. Menjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi. Perlu diidentifikasi disini kebutuhan-kebutuhan (sebagai tujuan) apa (termasuk kebutuhan sosial atau politik) yang hendak dicapai oleh organisasi (sebagai means).
 4. Mengukur lingkungan eksternal: peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Dalam hal ini perlu diidentifikasi berbagai faktor dari luar yang menyangkut bidang-bidang yang disingkat sebagai PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknologi).
 5. Mengukur lingkungan internal: kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Untuk itu, organisasi dapat memonitor sumberdaya (input), strategi sekarang (proses), dan kinerja (output).
 6. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Isu-isu tersebut mengandung konflik yang mungkin menyangkut tujuan (apa), cara (bagaimana), falsafah (mengapa), lokasi (dimana), ketepatan waktu (kapan), dan kelompok yang mungkin mem-

peroleh keuntungan atau sebaliknya kerugian bila cara-cara pemecahan masalah tertentu ditempuh (who).

7. Memformulasikan strategi-strategi untuk menangani isu-isu tersebut.
8. Menciptakan suatu visi organisasi yang efektif untuk masa mendatang.

Langkah-langkah tersebut digambarkan sebagai suatu "strategic planning process" (lihat Bryson, 1988:50-51). Meskipun Bryson berbicara dalam konteks organisasi, namun idenya sangat relevan untuk pengembangan wilayah bila kabupaten atau propinsi dilihat sebagai satu kesatuan atau unit perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan kerangka "strategic planning" maka pembangunan regional di Kabupaten Fakfak sebaiknya dituntun oleh visi tertentu, didasarkan atas mandat, misi dan tujuan tertentu, dan diimplementasikan melalui pengembangan sektor-sektor dan wilayah-wilayah strategis setelah melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal. Dengan kata lain, identifikasi dan pengembangan sektor-sektor dan wilayah strategis merupakan sasaran akhir dari proses strategic planning.

Dengan memperhatikan ide-ide dasar dari "integrated regional development" dan "strategic planning" diatas maka identifikasi sektor-sektor dan wilayah-wilayah strategis bagi pembangunan regional di Irian Jaya khususnya di Kabupaten Fakfak didasarkan atas tiga persepsi yaitu (1) pemerintah, (2) masyarakat lokal, dan (3) ahli/pakar. Ketiga persepsi tersebut dapat dijadikan input bagi

analisis SWOT, sehingga dapat terungkap sektor-sektor strategis, dan selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan dalam suatu proses *synthesis*.

Output yang diharapkan dari proses ini adalah tersusunnya strategi pengembangan sebagai alternatif pembangunan regional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan regional yang pada dasarnya (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, (2) mengurangi ketimpangan, dan (3) memelihara stabilitas.

Kerangka perencanaan regional yang dijiwai oleh "*strategic planing*" yang digunakan dalam studi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

internal dan eksternal dengan tujuan pembangunan regional (pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas).

- (3) Menentukan tujuan dan target, dan merumuskan strategi pengembangan dalam mencapai tujuan dan target.

Analisis yang dilakukan dalam pendekatan ini dinilai lebih obyektif karena menampung aspirasi dari tiga pihak sekaligus, yang tergambar dalam kekhasan persepsi mereka. Pemerintah disini sebagai pihak yang berpengalaman bertahun-tahun dalam membangun dan melayani daerah tentunya mempunyai persepsi tertentu, sementara masyarakat sebagai pihak

Gambar 1
Tahapan Perencanaan Strategis
Pembangunan Regional Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya

Deskripsi Persepsi/Aspirasi (1)	Analisis SWOT (2)	Synthesis Tujuan & Strategi (3)
Persepsi Pemerintah	Mencari kelemahan, potensi/kekuatan yang dimiliki Kab. Fakfak	Menetapkan Tujuan, susunan, dan prioritas
Persepsi Masyarakat	Mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Kab. Fakfak	Penyusunan strategi pengembangan
Persepsi Ahli/Pakar		

Keterangan:

- (1) Menggambarkan masing-masing persepsi sebagaimana adanya. pihak
- (2) Mengkaitkan faktor-faktor

yang selama ini menerima pelayanan dan memiliki kepentingan secara langsung juga memiliki persepsi yang khas. Demikian pula pihak perencana yang biasanya diwakili oleh para ahli/pakar memiliki persepsi yang

khlas karena profesi dan pengalaman lapangannya.

Metodologi

Untuk memformulasikan strategi pengembangan dalam rangka pembangunan regional di Kabupaten Fakfak dibutuhkan serangkaian metode yang mencakup sumber data dan analisis data.

Data tentang persepsi masyarakat dapat diperoleh dengan menerapkan metode "Participation Rapid Appraisal" atau PRA. Disini perspektif masyarakat lokal dapat dipelajari melalui suara para tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat lokal. Persepsi pemerintah diperoleh dengan melakukan "Analisis dan evaluasi Kebijakan" pembangunan melalui dokumen dan laporan tertulis, khususnya Pola Dasar Dati II. Dan perspektif perencana atau dapat dipelajari dengan melihat hasil studi lapangan baik menyangkut potensi lokal yang dimiliki, maupun keterkaitan dengan wilayah yang lain, seperti keterkaitan dengan kabupaten, propinsi, dan luar negeri.

Berdasarkan temuan pada ketiga persepsi diatas, dilakukan suatu analisis SWOT yang menyangkut "internal environment" dan "external environment". Di dalam lingkungan internal akan dianalisis (1) sumberdaya yang dimiliki, (2) strategi pembangunan yang telah diterapkan di kabupaten tersebut, dan (3) kinerja pembangunan yang telah dicapai selama ini. Penilaian akan diberikan kepada ketiga aspek tersebut dengan menunjukan apakah suatu aspek tertentu merupakan **kekuatan atau potensi (strengths)** yang perlu dipertahankan atau dikembangkan,

dan **kelemahan atau hambatan (weaknesses)** yang perlu dibenahi, diperbaiki, atau ditingkatkan.

Sumberdaya yang dimiliki mencakup kondisi fisik baik fisik dasar maupun terbangun, dan kondisi non fisik yaitu sosial budaya masyarakat, yang mungkin mendorong pembangunan (kekuatan), atau sebaliknya menghambat pembangunan (kelemahan). Strategi pembangunan meliputi bidang-bidang yang diprioritaskan untuk dibangun pada Pelita I sampai V di kabupaten tersebut, yang dapat mendorong pembangunan selanjutnya (kekuatan), atau yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pembangunan (kelemahan). Dan kinerja pembangunan mencakup hasil-hasil (kekuatan) dan kegagalan-kegagalan (kelemahan) selama masa pembangunan tersebut, yang sangat ditentukan oleh pemanfaatan sumberdaya dan strategi diatas.

Untuk lingkungan eksternal, akan dianalisis faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan dari luar yang mempengaruhi dinamika pembangunan di kabupaten tersebut, termasuk lingkungan: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial, dan (4) teknologi.

Disini akan diidentifikasi berbagai **peluang (opportunities)** yang perlu diisi atau dimanfaatkan, dan **ancaman (threats)** yang perlu dihindari pada masa mendatang.

Lingkungan politik mencakup keterkaitan politik yang dalam hal ini merupakan arahan kebijakan dari pusat dan propinsi yang dapat merangsang pembangunan di kabupaten tersebut (peluang), atau kebijakan pembangunan yang justru merugikan pembangunan daerah (ancaman). Lingkungan ekonomi

mencakup keterkaitan ekonomis khususnya permintaan pasar di luar wilayah kabupaten (peluang), atau saingan dipasar di luar wilayah kabupaten (ancaman). Lingkungan sosial meliputi keterkaitan sosio-demografis dengan wilayah lain di luar kabupaten tersebut, seperti masuknya penduduk pendatang agar dapat menambah tenaga pembangun (peluang), atau penduduk pendatang dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda (ancaman). Dan lingkungan teknologi berkenaan dengan ketersediaan teknologi seperti teknologi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi (kelebihan teknologis) yang terdapat di daerah lain yang mengurangi permintaan produksi tertentu (ancaman), atau transportasi dan komunikasi yang mungkin memperlancar hubungan dengan daerah lain diluar kabupaten tersebut (peluang).

Dalam analisis SWOT ini keterkaitan antara kondisi internal dengan eksternal dapat melahirkan beberapa jenis strategi sebagai berikut:

Analisis SWOT diatas memberikan gambaran tentang variasi karakteristik dari sektor dan wilayah strategis yang dapat dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan regional. Karakteristik dari sektor strategis dapat dibedakan atas tiga, yaitu sektor unggulan utama, sektor unggulan penunjang, dan sektor pendukung. Sedang wilayah strategis adalah ruang dimana dikembangkan sektor unggulan utama dan penunjang.

Untuk menentukan sektor unggulan dipergunakan beberapa kriteria dasar:

- (a) Sektor-sektor yang diusulkan harus disetujui sebagai yang "penting" untuk dikembangkan. Artinya sektor dan wilayah yang diusulkan harus didukung atau didasarkan atas konsensus pemerintah, masyarakat, dan para ahli (konsultan).
- (b) Sektor-sektor yang diusulkan tersebut harus mampu mengisi

Gambar 2
Keterkaitan antara Kondisi
Internal dengan Kondisi Eksternal

Kondisi Internal	Kondisi Eksternal	
	Peluang	Ancaman
Kekuatan/Potensi	1 Strategi memanfaatkan potensi agar mengisi peluang	2 Strategi memanfaatkan potensi agar menghindar ancaman
Kelemahan/hambatan	3 Strategi menghilangkan hambatan agar mengisi peluang	4 Strategi menghilangkan hambatan agar menghindar ancaman

peluang ekonomi yang ada baik dalam maupun di luar daerah, baik yang bersifat basic maupun non basic.

- (c) Sektor-sektor tersebut harus secara terpadu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pemerataan, stabilitas, kelestarian alam, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- (d) Pengembangan sektor-sektor dan wilayah tersebut harus didukung oleh potensi fisik seperti kesesuaian lahan dan zona ekologis
- (e) Pengembangan sektor-sektor dan wilayah tersebut harus didukung oleh faktor penduduk, teknologi dan organisasi (kelembagaan) yang ada.

Dengan analisis struktur sektor dan keterpaduan antar sektor dapat terungkap **sektor unggulan utama, sektor unggulan penunjang, dan sektor pendukung**. Yang dimaksud dengan sektor unggulan utama adalah sektor-sektor yang berpotensi sebagai sektor "basic" yaitu yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pasar di luar wilayah (ekspor). Penentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan "assumption method". Yang dimaksud dengan sektor unggulan penunjang adalah sektor-sektor yang dalam jangka pendek dipersiapkan untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan sektor unggulan utama, dan dalam jangka panjang dapat mengarah kepada kegiatan ekspor (dapat menjadi sektor unggulan utama). Dan yang dimaksud dengan

sektor pendukung adalah sektor yang harus diciptakan atau dipersiapkan terlebih dahulu untuk memfungsikan atau memperlancar perkembangan sektor unggulan utama dan unggulan penunjang.

Setelah sektor unggulan utama, unggulan penunjang, dan pendukung ditentukan maka pada tahap berikutnya diidentifikasi strategi pengembangan melalui teknik "brainstorming", yang dihadiri berbagai stakeholders seperti para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang berkaitan, dan para perencana atau konsultan.

Untuk menilai strategi pengembangan dipergunakan beberapa kriteria antara lain apakah strategi yang dikembangkan tersebut:

- (a) mendukung ekosistem yang ada (**kelestarian lingkungan**)
- (b) efisien dilihat dari biaya dan manfaat yang diperoleh (**pertumbuhan**)
- (c) mendatangkan peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat (**pemerataan**)
- (d) sejalan dengan integritas budaya yang ada (**stabilitas**)
- (e) menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat (**partisipasi dan pemberdayaan**)
- (f) secara organisatoris dapat dilaksanakan (**kemampuan kelembagaan**).

Kondisi Eksternal dan Internal Kabupaten Fakfak

Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga persepsi secara ringkas. Persepsi pemerintah dapat diperoleh dengan menganalisis kebijakan yang tertuang dalam Pola Dasar Daerah. Aspirasi masyarakat dapat diketahui dengan menganalisis hasil studi PRA, dan pemikiran tim ahli dapat dilihat dari hasil analisis lapangan baik yang menyangkut kondisi internal dan eksternal Kabupaten Fakfak.

1. Persepsi Pemerintah

Sektor unggulan menurut perspektif pemerintah telah dimuat di dalam Pola Dasar Daerah Kabupaten Fakfak. Dalam dokumen resmi yaitu Pola Dasar daerah telah ditentukan bahwa yang menjadi prioritas pembangunan pada Pelita ke VI adalah

- (1) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan,
- (2) peningkatan sumberdaya manusia,
- (3) penerobosan isolasi,
- (4) pengentasan kemiskinan, dan
- (5) pengembangan sektor-sektor unggulan.

Dalam kebijakan pemerintah (Pola Dasar) tersebut, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, sektor transmigrasi dan pemukiman perambah hutan, dan sektor transportasi dan komunikasi. Bagaimana kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan masing-masing sektor unggulan diatas

telah dijelaskan dalam Pola Dasar.

2. Persepsi Masyarakat

Studi PRA dilakukan dalam suatu forum yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Fakfak. Dalam forum itu mereka telah dirangsang oleh tim PRA yang dipimpin oleh beberapa dosen Universitas Cendrawasih (Jayapura) untuk mengungkapkan secara bebas (tanpa paksaan) tentang masalah apa saja yang perlu ditangani di Kabupaten Fakfak pada masa mendatang, masalah mana yang paling penting ditangani, dan bagaimana cara penanganan yang mereka sarankan.

Meskipun keputusan mereka dalam forum tersebut belum tentu paling tepat karena mereka kurang memiliki ketrampilan (skills) untuk mengidentifikasi masalah secara cermat dan mengambil keputusan, tetapi paling tidak pengalaman mereka, aspirasi mereka atau kepentingan mereka dapat terungkap. Dan apa yang mereka ungkapkan merupakan harapan-harapan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten ini.

Hasil studi PRA menunjukkan bahwa masalah-masalah yang disepakati untuk ditangani di Kabupaten Fakfak pada masa mendatang, berturut-turut meliputi:

- (a) pendapatan masyarakat yang rendah,
- (b) tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah,
- (c) tingginya jumlah pengangguran,
- (d) minimnya investor masuk
- (e) hasil program-program peme-

- rintah yang masih belum optimal,
- (f) potensi daerah yang masih kurang diketahui,
 - (g) tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, dan
 - (h) kendala-kendala sosial budaya dalam pengembangan masyarakat.

Bila hasil studi PRA tersebut dicermati maka yang dibutuhkan masyarakat lokal adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Untuk itu perlu didukung oleh kegiatan investasi, dukungan pemerintah, eksplorasi kekayaan alam, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta didukung oleh faktor sosial budaya masyarakat. Secara implisit sektor-sektor yang perlu dikembangkan menurut persepsi masyarakat adalah:

- (a) ekonomi (perkebunan, kehutanan, pertanian),
- (b) aparatur pemerintah,
- (c) kesehatan,
- (d) pendidikan, dan
- (e) sosial budaya.

3. Persepsi Ahli/Pakar

Persepsi ahli/pakar yang disajikan disini didasarkan pada pengolahan data dari lapangan yang dilakukan oleh tim khusus. Persepsi yang disajikan disini menyangkut keterkaitan antara Kabupaten Fakfak dengan wilayah di luarnya (lingkungan eksternal), dan potensi-potensi wilayah yang dimiliki (lingkungan internal).

a. Lingkungan eksternal

Sebagaimana halnya dengan kabupaten lainnya di Irian Jaya, Kabupaten Fakfak memiliki

sumberdaya alam yang cukup kaya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan perkembangannya di masa mendatang karena terdapat cukup besar peluang bisnis pada level regional, nasional maupun internasional. Apalagi dengan munculnya negara-negara NIE (Newly Industrialized Economy) seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong. Letaknya yang pada posisi geografis yang strategis itu membuat Irian Jaya untuk cepat terangkat pada abad ke 21 ini manakala perekonomiannya terintegrasi dengan business di daerah Pasifik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus kepada pembangunan Indonesia Bagian Timur sebenarnya merupakan momentum yang bernilai bagi pembangunan di Irian Jaya termasuk Kabupaten Fakfak. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi keadaan tersebut dan telah mengeluarkan berbagai ketentuan investasi yang dapat menarik masuk investor asing ke Irian Jaya. Untuk itu pemerintah mempermudah lamaran masuk investor, menyediakan fasilitas dan infrastruktur, memberikan hak-hak atas tanah, mempersiapkan masyarakat dalam pembangunan, menyediakan sumberdaya manusia, memberikan kelonggaran dalam memanfaatkan jasa perbankan, mempermudah perdagangan internasional, dan menjaga stabilitas sosial politik dalam rangka melindungi para investor dan masyarakat setempat.

Keterkaitan dengan lingkungan eksternal dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu dalam komoditi apa kabupaten Fakfak memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan

luar. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka diperlukan usaha untuk mendorong sektor non basic sehingga dapat menghasilkan bagi dirinya sendiri atau mendatangkan dari luar daerah, sedang untuk memenuhi permintaan dari luar daerah atau pemasaran keluar, Kabupaten Fakfak telah berusaha mendorong sektor basic. Bila dianalisis secara makro, nampak bahwa dalam beberapa komoditi tertentu Kabupaten Fakfak telah berusaha memenuhi kebutuhan lokal dan dalam beberapa komoditi yang lain berusaha memenuhi kebutuhan dari luar seperti tergambar berikut ini:

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa perkebunan, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor yang dapat dikembangkan karena memiliki pasaran diluar wilayah, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai sektor basic yang perlu mendapatkan perhatian di masa mendatang.

Meskipun demikian masih terdapat berbagai kendala yang kalau tidak diperhatikan akan menjadi ancaman di masa mendatang. Misalnya kendala yang pernah

Gambar 3.
Keterkaitan Pasar antara Kabupaten Fakfak dengan Daerah Luar

Komoditi	Dipasarkan ke	Didatangkan dari
Tanaman pangan pada, jagung, dsb.	Lokal	Ambon, Ujung Pandang, Maluku Tenggara, Surabaya
Perkebunan pala, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, dsb.	Singapura, hamburg, Netherland	-
Perikanan ikan puri, teripang, sirip hiu, japeng, dsb.	Ambon, Surabaya, Ujung Pandang, Hongkong, Thailand, Jepang	-
Kehutanan kayu logs, kayu gergajian, kayu lapis/olahan, kulit masohi, plywood & blockboard	Maluku, Ujung Pandang, Gresik, Surabaya, Jakarta, Jawa Brat Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan	-
Peternakan daging sapi, daging ayam, telur ayam	Lokal	Merauke, Sorong Manokwari, Ambon, Ujung Pandang, Surabaya
Industri kecil sandang, pangan, kulit, kimia, bahan bangunan, kerajinan logam	Lokal	-

Sumber: Kanwil Perdagangan, Propinsi Irian Jaya, 1995

diungkapkan oleh Kanwil Perdagangan yang berkenaan dengan perdagangan dalam daerah antara lain: penyaluran bahan penting ke beberapa daerah masih mengalami hambatan disebabkan biaya angkut yang cukup tinggi; peranan KUD dalam menghimpun dan membantu pemasaran komoditi masih terbatas; pemberian ijin terhadap komoditi yang diatur dalam tata niaganya oleh Pemda Tkt.I Irian Jaya masih mengalami keterlambatan; tidak tersedianya tenaga metrologi yang menetap pada Kantor Perdagangan Kabupaten Fakfak; tidak tersedianya dana untuk pengawasan/penyuluhan kemetrologian; dan tidak tersedianya bengkel ukuran Takaran Timbangan perlengkapan di kabupaten Fakfak.

Dalam urusan dengan perdagangan luar negeri, dihadapi beberapa kendala antara lain kapasitas produksi usaha masyarakat yang masih terbatas, kualitasnya rendah, terpecah di pelosok pedesaan dan cenderung hanya musiman saja; program pengembangan ekspor yang dikaitkan dengan Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri belum konkrit sampai tingkat kabupaten; sistim monitoring pelaksanaan ekspor dan import yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri (PMA dan PMDN) masih mengalami kendala karena kekurangan dana; dan sarana dan prasarana penunjang yang terkait dengan ekspor masih belum memadai.

b. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dibatasi pada beberapa sektor penting antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, industri (Laporan Tahunan Kantor Departement Perdagangan Kabupaten Fakfak, 1995). Pada tahun 1991 sumbangan dari sub sektor tanaman pangan terhadap PRDB Kabupaten sebesar 13.90%, sub sektor perkebunan rakyat sebesar 18.90%, sub sektor peternakan sebesar 0.75%, sub sektor perikanan sebesar 3.75%, dan subsektor kehutanan sebesar 10.52%, berdasarkan harga berlaku. Nampaknya sumbangan subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, perikanan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1990, sementara sub sektor perikanan, dan kehutanan mengalami kenaikan (Fakfak Dalam Angka, 1994).

Untuk sektor tanaman pangan telah diupayakan peningkatan produksi pada jenis tanaman policultural meliputi padi dan palawija (jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan keladi/talas), sedang horticultural meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan. Meskipun demikian, Kabupaten tersebut masih mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhan hasil pertanian tanaman pangan yang terpaksa harus didatangkan dari Ambon, Ujung Pandang, dan Surabaya, seperti

kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, bawang merah, bawang putih, kol, wortel, kentang, dan buah-buahan.

Beberapa masalah yang perlu dipecahkan di masa mendatang meliputi pemanfaatan potensi alam yang masih minim, keterbatasan penyediaan teknologi dan tingkat pendidikan di kalangan petani, daya dukung tingkat kesuburan yang relatif masih rendah, permodalan petani yang sangat lemah, investasi pihak swasta belum ada, sarana dan prasarana pendukung untuk pemasaran hasil pertanian masih terbatas, dan pasar yang tidak bisa dikendalikan oleh petani tetapi oleh tengkulak, sementara sistem koperasi di tingkat lokal masih lemah.

Dalam sektor perkebunan telah diupayakan peningkatan diversifikasi komoditi baik untuk pasar antar pulau maupun untuk ekspor. Sektor ini sebagian besar dimiliki oleh masyarakat yang dikelola secara tradisional. Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat antara lain pala, kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, cengkeh, kopi, karet, tebu, dan jambu mente. Sedangkan yang diusahakan oleh perusahaan besar seperti PT. Adijaya Mulia berlokasi di Pulau Adi Kecamatan Kaimana meliputi kakao, kelapa, dan horticultura.

Hasil perkebunan dari kabupaten tersebut yang dijual keluar meliputi pala, bunga pala, kakao, dan kopra. Sedang komoditi cengkeh

ditampung oleh PUSKUD Jayapura dan dikirim ke Manokwari dan selanjutnya dipasarkan ke Jawa. Perlu diketahui bahwa hasil perkebunan yang mampu menembus pasaran internasional lewat pelabuhan Surabaya adalah pala dan bunga pala, dengan tujuan Singapura, Hamburg dan Nederland.

Sampai sekarang masih terdapat beberapa masalah yang harus dipecahkan menyangkut kualitas komoditi yang masih rendah seperti pala, bunga pala, kakao dan cengkeh, biaya perawatan dan pemetikan yang cukup tinggi dengan harga yang belum dapat bersaing di pasaran sehingga petani enggan untuk mengelola lahan perkebunan, dan harga seringkali tidak stabil di pasaran sehingga menurunkan gairah untuk berusaha.

Sektor kehutanan nampaknya memiliki potensi tinggi. Dari luas areal sebanyak 5.694.091 ha telah dimanfaatkan sebanyak 32.6% untuk hutan produksi yang dapat dikonversikan, 24% untuk hutan lindung, 22.3% untuk hutan suaka alam dan wisata kawasan hutan, 13% untuk hutan lindung, 6% untuk hutan produksi terbatas dan yang sisanya untuk penggunaan lainnya. Meskipun demikian masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pengawasan dan inventarisasi hutan, dan juga tenaga terdidik, terlatih dan trampil yang mendukung pendayagunaan hutan, serta medan yang sangat berat yang seringkali menghalangi usaha untuk

eksploitasi hasil hutan dan pengamanannya.

Untuk sektor perikanan diupayakan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan sebagai dukungan finansial bagi pendapatan daerah. Dalam tahun 1995 terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha hasil perikanan dan telah menanamkan modalnya antara lain CV. Timur Raya, PT Usaha Mina, CV. Pelita, Toko Subur, yang kesemuanya beroperasi di Kecamatan Fakfak, sementara PT Istana Samudera Nusantara, Toko Pasifik, Toko Tri Angkasa, dan PT. Samudera Cipta Abadi yang beroperasi di Kecamatan Kaimana. Jenis perikanan laut yang potensial untuk diusahakan oleh masyarakat nelayan meliputi ikan puri, teripang, sirip dan ekor ikan hiu, kulit mutiara, japeng-japeng, daging siput, perut ikan, duri babi, dan ikan cakalang. Sementara itu terdapat juga hasil perikanan darat (tambak dan kolam) antara lain udang, ikan bandeng, ikan mas, ikan mujair, dan ikan tawes. Pemasaran hasil perikanan laun ini cukup baik antara lain ke Ambon, Surabaya, dan Ujung Pandang, dan diekspor ke Hongkong, Jepang, dan Thailand.

Dalam sektor tersebut para nelayan masih mengalami berbagai masalah antara lain belum tersedianya tempat pelelangan ikan di kabupaten Fakfak sehingga para nelayan menjualnya sendiri-sendiri, cara penangkapannya masih tergolong tradisional dan sederhana, dan juga

masih terbatasnya kemampuan dan ketrampilan petani tambak dan kolam.

Usaha dalam sektor peternakan nampaknya mengalami peningkatan baik dalam populasi maupun produksi. Jenis ternak yang diusahakan antara lain sapi, kambing, babi, ayam ras, ayam buras, dan entog. Jenis ternak yang cukup menonjol perkembangannya adalah sapi dan ayam ras. Data tahun 1995 menunjukkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya populasi ternak meningkat 7.52%, sedang produksi ternak meningkat 90.24%. Ternak sapi nampaknya mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 17.25%, dengan pertumbuhan hasil produksi hampir 500% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Urutan kedua ditempati oleh ayam ras yang pertumbuhannya sekitar 7%, dan kenaikan produksinya mencapai 200% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Usaha di sektor ini masih mengalami beberapa masalah antara lain belum adanya tempat atau rumah potong hewan secara khusus, rendahnya kemampuan dan ketrampilan peternak dalam beternak, dan masyarakat belum melihat peternakan sebagai suatu sumber penghasilan utama, dan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja.

Dilihat dari segi modal maupun hasil produksinya, industri yang ada di Kabupaten Fakfak masih tergolong industri kecil. Jenis industri kecil tersebut antara lain industri pangan, sandang kulit, kimia dan bahan

bangunan, kerajinan, dan logam. Bila dibandingkan dengan tahun 1994, perkembangan sektor industri di tahun 1995 mengalami penurunan, yaitu dari 334 unit usaha ke 84 unit usaha, atau dengan menyerap tenaga kerja dari 909 orang menjadi 274 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya industri kecil yang bersifat non formal dimana kegiatan usahanya bersifat musiman.

Industri-industri kecil ini nampaknya masih terbatas untuk mendukung kebutuhan lokal saja sehingga perkembangannya sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah antara lain tenaga pengelola industri masih kurang trampil, cenderung bersifat sementara atau musiman, kuantitas dan kualitas tenaga kerja belum memadai untuk bersaing di pasaran luar daerah, tingginya biaya produksi serta terbatasnya daya serap pasaran lokal, dan pengusaha industri kecil itu sendiri belum mampu dan berani memanfaatkan sumber-sumber permodalan yang ada.

Untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi transportasi (perhubungan darat, laut, dan udara), lembaga-lembaga keuangan, perusahaan jasa ekspedisi, penanaman modal, pasar, dsb.

Dalam sektor perhubungan darat nampak masih dirasakan keterbatasan prasarana dan sarana. Permukaan jalan sebagian besar masih berupa kerikil/perkerasan, dan

sebagian sudah aspal, dengan kondisi secara keseluruhan tergolong "sedang" dan "baik" dengan jumlah kendaraan roda empat yang terkonsentrasi di kota Fakfak. Untuk perhubungan udara nampak masih terbatas mengingat jenis pesawat yang tergolong kecil seperti Twin Otter, Cesna, dan F28. Sarana dan prasarana perhubungan laut nampak sangat vital di Kabupaten Fakfak. Untuk kelancaran perhubungan maka dermaga di kota Fakfak dan di Kaimana sangat memainkan peranan penting.

Disamping itu, pemerintah daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemilik modal baik pemilik modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Fakfak, seperti PT Adi Jaya Mulia cabang Fakfak untuk komoditi coklat, PT. Budhi Nyata Cabang Fakfak, PT. Sedia Mulia Utama, PT. Prabu Alaska Fakfak, dan PT Arfak Indra Cabang Fakfak untuk komoditi kayu.

Dalam rangka menunjang perekonomian juga terdapat beberapa pasar yang cukup memainkan peranan penting di Kabupaten Fakfak dalam memperdagangkan hasil laut, hasil pertanian, pangan, dan kelontong. Di kecamatan Fakfak terdapat 4 pasar, di Kecamatan Kokas 4, di Kecamatan Kaimana 1 pasar, dan di Teluk Arguni 1 pasar, dan hampir semuanya didanai oleh program Inpres.

Disamping pasar, juga terdapat lembaga keuangan yang memainkan

peranan yang cukup penting khususnya di kota Fakfak dan Kaimana. Pada tahun 1995 terdapat 3 bank yang beroperasi di 5 lokasi pada Kabupaten Fakfak yaitu PT. Bank Eksim Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Rakyat Indonesia, sementara yang beroperasi di Kaimana adalah Bank Pembangunan Daerah, dan bank Rakyat Indonesia. Disamping bank juga terdapat perusahaan asuransi yaitu Asuransi Bumi Putera 1912, Asuransi Jiwasraya, dan Koperasi Asurasi Indonesia, yang ketiga-tiganya terdapat di Kota Fakfak.

Kegiatan bongkar muat di pelabuhan laut nampaknya sangat didukung oleh perusahaan jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Pada tahun 1995 tercatat 5 perusahaan ekspedisi yaitu PT.Taswa Raya, PT. Pelni, PT.Varunapura, yang terdapat di Kecamatan Fakfak, dan PT.Kumawa Raya dan PT.Pelni Cabang Kaimana terdapat di Kaimana. Peranan perusahaan ini sangat penting di Kabupaten Fakfak.

Sarana perekonomian lainnya khususnya berkaitan dengan sektor pariwisata ialah hotel atau tempat penginapan. Data dari tahun 1995 menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kabupaten tersebut sebanyak 10, yaitu Hotel Haranya, Marcopolo, Sulinah, Tembagapura dan Bumi Salobar Indah di kota Fakfak, dan Hotel Selatan Indah dan Diana di Kaimana.

Kunci suksesnya pembangunan adalah sumber daya manusia. Karena

itu kualitas, kuantitas, dan distribusi sumber daya manusia mendapat perhatian khusus dalam pembangunan. Kabupaten Fakfak dengan luas wilayah yang sedemikian luas hanya dihuni oleh penduduk yang sangat jarang yaitu dengan kepadatan sekitar 2 sampai 3 orang per km². Dengan kepadatan yang demikian untuk tahun-tahun mendatang perhatian hendaknya dipusatkan juga pada bagaimana menambah jumlah penduduk untuk menunjang pembangunan lokal. Dari data yang diperoleh, Kabupaten Fakfak tergolong sukses dalam program Keluarga Berencana. Hal ini berarti usaha menekan pertumbuhan penduduk secara alamiah telah berhasil, dan implikasi pada pertambahan jumlah penduduk di masa mendatang kuranglah berarti. Karena itu, dalam kaitannya dengan kuantitas SDM diperlukan program transmigrasi yang secara cepat mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten tersebut.

Dilihat dari kualitas SDM, nampak jelas bahwa kualitas penduduk asli Irian Jaya di Kabupaten Fakfak masih rendah. Hal ini dapat dimengerti mengingat pelayanan di bidang pendidikan dasar, menengah, dan atas masih kurang memadai, apalagi penduduk asli masih bermukim secara terpencar dan terisolir. Keterisolasian tersebut telah membuat penduduk asli tetap berorientasi pada nilai-nilai tradisional yang seringkali masih bertentangan

dengan tujuan pembangunan. Sementara itu, penduduk pendatang pada umumnya bermukim di Kota Fakfak dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi dan banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi formal dan informal.

Untuk menyukseskan pembangunan dibutuhkan juga dukungan kelembagaan yang memadai termasuk kelembagaan yang berada pada tingkat yang paling bawah. Dalam rangka mengefisienkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan pemekaran kecamatan yang semula hanya 5 yaitu Kec.Fakfak, Kokas, Kaimana, Teluk Etna dan Teluk Arguni, menjadi 7 Kecamatan yaitu Kec.Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kaimana, Kokas, Teluk Etna, Teluk Arguni dan Buruway. Dengan demikian jumlah Camat, Sekretaris, Urusan dan tenaga administratif meningkat.

Nampaknya rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penduduk yang dilayani masih rendah atau belum menimbulkan masalah namun bila dilihat dari medan pelayanan dimana penduduk bermukim pada tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau maka dukungan personil kecamatan yang ada dinilai masih belum memadai. Apalagi, dukungan dari prasarana kecamatan itu sendiri juga belum memadai seperti kantor camat, rumah camat, dan rumah pegawai.

Analisis SWOT

Berdasarkan ketiga persepsi diatas maka berikut ini akan diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki atau dihadapi Kabupaten Fakfak dewasa ini, yang dituangkan dalam kerangka SWOT berikut ini:

a. Faktor Internal

Dalam kaitannya dengan faktor internal, telah diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan di tiga bidang utama seperti yang telah dibahas, antara lain:

1. Kekuatan

(1) Sumberdaya yang dimiliki

- (a) Kekayaan alam (di daratan) yang berlimpah termasuk hasil hutan, jenis fauna yang sangat beragam (130 jenis). Hal ini dimungkinkan untuk dikembangkan sektor kehutanan.
- (b) Lahan masih tersedia luas dan bebas untuk digunakan, serta cocok untuk pengembangan perkebunan, pertanian, peternakan dan permukiman/transmigrasi dsb. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan.
- (c) Potensi laut yang cukup besar. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor perikanan.

- (d) Terdapat beberapa sungai yang potensial untuk pengairan. Potensi ini memungkinkan dikembangkan sektor pertanian.
- (e) Tekanan penduduk belum berarti. Dalam hal ini pengembangan sektor kependudukan masih diperlukan.
- (2) Strategi pembangunan yang diterapkan
 - (a) Sarana produksi dan jaringan jalan, bongkar muat dan navigasi mulai dibangun
 - (b) Titik berat pembangunan pada pertanian
 - (c) Perhatian terhadap bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan mulai meningkat
 - (d) Telah dilakukan perluasan pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura
 - (e) Telah diadakan perbaikan teknologi penangkapan ikan
 - (f) Telah dilakukan pembinaan perusahaan hutan
 - (g) Hasil pembangunan yang dicapai
 - (h) Keamanan dan kestabilan yang cukup baik. Hal ini memungkinkan dikembangkannya pola-pola investasi bagi daerah tersebut.
 - (i) Kerukunan beragama cukup baik
 - (j) Tingkat buta huruf telah

- menurun drastis
- (k) Penduduk mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar
- (l) Usaha perusahaan hutan khususnya industri Plywood dan Kayu Gergajian telah merangsang kegiatan ekonomi penduduk lokal
- (m) Masyarakat mulai meninggalkan sistem perekonomian tradisional (sistem barter)

2. Kelemahan

- (1) Sumberdaya
 - (a) Kualitas sumber daya manusia yang masih memprihatinkan
 - (b) Jumlah penduduk masih relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayah
 - (c) Kondisi geografis dan topografis yang masih memberikan hambatan bagi pembangunan di sektor perhubungan darat
 - (d) Permukiman penduduk masih terpecah dan terpencil
 - (e) Kondisi sosial budaya belum berkembang
 - (f) Strategi Pembangunan
 - (g) Mekanisme perencanaan yang berasal dari bawah masih belum berkembang.
 - (h) Pelayanan pemerintahan yang masih terbatas khususnya di bidang organisasi dan manajemen pada tingkat pedesaan
 - (i) Investasi di sektor pertanian

- masih terbatas sehingga pemanfaatan lahan dan alih teknologipun masih rendah
- (j) Program transmigrasi yang seharusnya dikaitkan dengan pengembangan wilayah dan ekonomi, serta membantu relokasi penduduk lokal yang bermukim di kawasan-kawasan yang kritis dan rawan bencana, masih belum berjalan secara optimal.
 - (k) Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan yang masih minim.
- (3) Hasil Pembangunan
- (a) Perkembangan sektor ekonomi pedesaan berjalan lambat.
 - (b) Keterbatasan pasar dalam kabupaten
 - (c) Kekurangan prasarana dan sarana transportasi baik laut, darat, dan udara.
 - (d) Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas dan kuantitas tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis.
 - (e) Ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan masih menonjol
 - (f) Kualitas pendidikan masih rendah
 - (g) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketertiban dan keagamaan, masih rendah.
 - (h) Produksi pertanian masih rendah dan diversifikasi tanaman dan pemasaran hasil-hasilnya masih terbatas.
 - (i) Pemukiman yang masih belum memenuhi syarat-syarat kesehatan
 - (j) Belum terciptanya iklim usaha yang sehat bagi semua golongan ekonomi
 - (k) Menurunnya kualitas komoditi unggulan tertentu. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian terhadap perbaikan kualitas komoditi unggulan.
 - (l) Kekurangan pasar lokal dalam mendukung berbagai usaha penduduk.
 - (m) Kemampuan lembaga pelayanan publik yang masih lemah.
- b. Faktor Eksternal
- Faktor eksternal mencakup beberapa aspek antara lain aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Adapun peluang dan ancaman dalam masing-masing aspek tersebut terdiri atas:
- (1) Peluang
 - a) Di bidang politik, terdapat kebijakan pembangunan yang diprioritaskan bagi Kawasan Timur Indonesia.

- termasuk kabupaten Fakfak, dan juga adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor
- b) Di bidang ekonomi terdapat beberapa komoditi yang laku dipasar di luar wilayah termasuk di pasar internasional seperti hasil-hasil hutan, perkebunan, dan perikanan
 - c) Di bidang sosial masih terdapat peluang untuk masuknya migran (dari berbagai daerah di Indonesia) sehingga menambah tenaga pembangunan lokal dan dapat merangsang pembangunan lokal karena kualitas mereka relatif lebih baik.
 - d) Di bidang teknologi terdapat komunikasi perhubungan laut yang relatif lancar sehingga memungkinkan perdagangan dengan daerah lain.
 - e) Ancaman
 - f) Di bidang politik masih terdapat isu yang berkaitan dengan ketimpangan daerah dan wilayah yang menimbulkan kecemburuan sehingga dapat mengganggu kestabilan pada tingkat lokal, dan mungkin dapat menurunkan daya tarik investor
 - g) Di bidang ekonomi tidak

adanya perlindungan harga terhadap komoditi tertentu dan masih adanya persaingan di pasar terhadap komoditi tertentu

- h) Di bidang sosial daya tarik penduduk luar untuk bekerja atau tinggal di Kabupaten tersebut relatif rendah
- i) Adanya perbaikan teknologi produksi dalam meningkatkan kualitas komoditi di luar wilayah sehingga menimbulkan kompetisi yang ketat

Identifikasi Sektor-sektor Strategis

Dari analisis SWOT di atas dapat diambil implikasinya berkaitan dengan sektor-sektor yang perlu dikembangkan di masa mendatang. Pembangunan regional di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat mengacu pada sektor-sektor tersebut.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, analisis SWOT diarahkan pada 4 (empat) kemungkinan yaitu (1) bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk mengisi peluang yang ada, (2) bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk menghindari ancaman dari luar, (3) bagaimana meningkatkan potensi atau menghilangkan hambatan dari dalam agar dapat mengisi peluang yang ada, dan (4) bagaimana meningkatkan potensi, atau menghilangkan hambatan agar menghindari ancaman

yang datang dari luar.

Kemungkinan 1 dan 3 yang menyangkut bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, atau menghilangkan hambatan dari dalam, agar mampu mengisi peluang yang ada (di luar daerah), menunjukkan agar perhatian hendaknya diberikan kepada sektor-sektor yang bersifat "basic" yang bila dikembangkan sesuai potensi yang ada akan memenuhi pasar di luar Kabupaten, dan selanjutnya mendatangkan pertumbuhan ekonomi daerah secara cepat. Sektor-sektor tersebut telah nampak peranannya dalam analisis SWOT diatas, yaitu:

1. Sektor Kehutanan
2. Sektor Perkebunan
3. Sektor Pertanian Tanaman Pangan
4. Sektor Perikanan
5. Sektor Peternakan

Kemungkinan 2 dan 4 berisi bagaimana menghindari ancaman yang datang dari luar dengan mengembangkan potensi yang ada, atau menghilangkan hambatan dari dalam daerah. Implikasinya adalah bahwa perhatian perlu diberikan kepada semua sektor "non basic" dalam rangka **memperkuat** dan **menunjang** kedudukan kelima sektor "basic" diatas dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelayanan lokal. Sesuai dengan analisis SWOT diatas, sektor-sektor tersebut antara lain:

1. Sektor Pengembangan Sarana dan Prasarana
2. Sektor pendidikan dan kesehatan (peningkatan kualitas SDM)

3. Sektor pemerintahan (kelembagaan)
4. Sektor perdagangan
5. Sektor Kependudukan dan Transmigrasi

Berikut ini akan dipilah sektor-sektor unggulan utama, sektor unggulan penunjang dan pendukung, dan digambarkan bagaimana struktur dari sektor unggulan yang menunjukkan keterpaduan antara satu dengan yang lain.

a. Sektor Unggulan Utama

Yang dimaksud dengan sektor unggulan utama adalah sektor-sektor yang berpotensi sebagai sektor "basic" yaitu yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pasar di luar wilayah (ekspor) sehingga mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tersebut terdiri atas:

1. Sektor Kehutanan
2. Sektor Perkebunan
3. Sektor Perikanan.

Dilihat dari kriteria kesesuaian lahan/fisik, potensi pengembangan ketiga sektor tersebut sangat besar. Apalagi dukungan penduduk terhadap pengembangan ketiga sektor tersebut selama ini cukup baik. Diharapkan dengan dikembangkan komoditi unggulan dari masing-masing sektor, maka Kabupaten Fakfak dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga pendapatan sekaligus kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan.

b. Sektor Unggulan Penunjang

Yang dimaksud dengan sektor unggulan penunjang adalah sektor-sektor yang dalam jangka pendek dipersiapkan untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan sektor unggulan utama, dan dalam jangka panjang dapat mengarah kepada kegiatan ekspor (dapat menjadi sektor unggulan utama). Sektor-sektor tersebut terdiri atas:

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan
2. Sektor Peternakan.

Dilihat dari kriteria kesesuaian lahan, pengembangan kedua sektor ini masih dimungkinkan bahkan ada beberapa daerah yang sangat potensial bagi pengembangan kedua sektor tersebut. Diharapkan agar pengembangan kedua sektor tersebut dapat lebih banyak memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, sekaligus mempersiapkan swasembada pangan di masa mendatang.

c. Sektor Pendukung

Sektor pendukung adalah sektor yang harus diciptakan atau dipersiapkan terlebih dahulu untuk memfungsikan atau memperlancar perkembangan sektor unggulan penunjang sekaligus unggulan utama. Sektor-sektor tersebut antara lain:

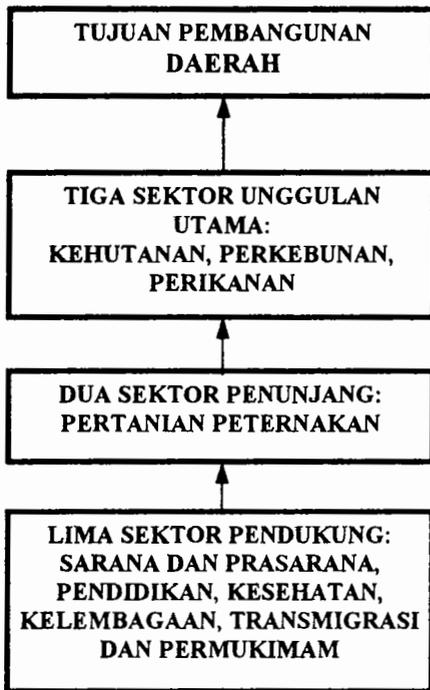
1. Sektor Sarana dan Prasarana
2. Sektor Pendidikan
3. Sektor Kesehatan
4. Sektor Kelembagaan
5. Sektor Transmigrasi dan Pemukiman

Ditinjau dari kriteria dukungan fisik, pengembangan prasarana khususnya jalan nampak mengalami kesulitan karena kondisi medan yang cukup sulit. Namun dengan ketersediaan teknologi dewasa ini, hambatan fisik tersebut akan secara berangsur dapat diatasi. Dukungan prasarana laut dapat ditingkatkan di masa mendatang karena potensi masih cukup besar untuk dikembangkan, sementara dukungan prasarana udara masih dinilai cukup untuk kebutuhan sekarang, dan di masa mendatang masih dapat ditingkatkan lagi, asalkan mendapat dukungan dana. Dukungan pendidikan dan kesehatan masih dapat ditingkatkan tergantung dari pengembangan sarana dan prasarana diatas, dan juga pengembangan transmigrasi dan pemukiman penduduk. Kelima sektor tersebut dipersiapkan dalam jangka pendek dan menengah sekaligus menjadi "prakondisi" bagi pengembangan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat, dan pelayanan pemerintah dan swasta.

d. Struktur Sektor-Sektor Strategis

Dari hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Fakfak perlu memberi perhatian khusus terhadap sepuluh sektor unggulan, yang secara terpadu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Sektor Strategis di Kabupaten Fafak



Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dibutuhkan tiga sektor unggulan utama yang harus dikembangkan, didukung oleh pengembangan dua sektor unggulan penunjang. Untuk menunjang secara langsung sektor unggulan utama dan unggulan penunjang tersebut diperlukan pengembangan lima sektor pendukung.

Strategi Pembangunan Regional

Telah dipaparkan sebelumnya informasi tentang sektor dan wilayah strategis yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan di

Kabupaten Fafak. Sektor-sektor dan wilayah tersebut akan digunakan sebagai input dasar bagi penyusunan Strategi Pembangunan Regional. Dalam bagian ini akan disajikan berturut-turut Visi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Pengembangan, Lingkup Pengembangan, dan Strategi Pengembangan Wilayah Terpadu. Bahan-bahan yang digunakan disini merupakan sintesis dari keseluruhan proses perencanaan strategis, sehingga pasti berbeda dengan arahan-arahan pemerintah.

1. Visi

Pada tahun 2015, Kabupaten Fafak telah menjadi salah satu kawasan industri di Kawasan Timur Indonesia yang handal dengan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan utama yang tinggi, tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang terendah, dan stabilitas di bidang sosial, politik, dan keamanan yang mantap.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan taraf hidup penduduk sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Fafak
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata di dalam wilayah kabupaten Fafak
- c. Meningkatkan keterkaitan pembangunan khususnya antara sistim produksi dan pemasaran dengan daerah luar
- d. Meningkatkan stabilitas sosial dan

politik di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak.

3. Sasaran

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
- b. Peningkatan kualitas SDM penduduk
- c. Peningkatan aksesibilitas wilayah kabupaten
- d. Peningkatan kualitas lembaga pelayanan publik
- e. Peningkatan pembinaan masyarakat lokal
- f. Peningkatan jaringan kerjasama ekonomi antar daerah inter kabupaten, antar kabupaten se propinsi Irian Jaya, dan antar pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.

4. Prioritas

- a. Peningkatan investasi pada sektor unggulan utama dan penunjang, yaitu perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan dan pertanian tanaman pangan.
- b. Peningkatan investasi pada sektor pendukung yaitu sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan, kelembagaan, transmigrasi dan permukiman.

5. Lingkup Pengembangan

Lingkup pengembangan mencakup dimensi sektoral dan spasial. Dari dimensi sektoral, seperti telah

diungkapkan sebelumnya, sektor-sektor yang hendak dikembangkan dalam konteks makro sektoral adalah sektor unggulan yang berjumlah 10 (sepuluh). Dari dimensi spasial, lingkup pengembangan dibatasi pada wilayah-wilayah prioritas berdasarkan pendekatan mikro spasial, yaitu wilayah pengembangan sektor unggulan di SWP Fakfak, SWP Kokas, di SWP Kaimana, SWP T.Arguni, dan SWP T.Etna, dan wilayah-wilayah terisolir yang terpencar.

6. Strategi Pembangunan Sektoral

Strategi-strategi yang dikemukakan disini merupakan strategi yang pengembangan sektornya telah dipadukan dengan pengembangan sektor lain terutama sektor pendukung, dan disesuaikan dengan potensi dan peluang atau kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

a. Sektor Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan dilakukan dengan meningkatkan produksi hutan produksi biasa dan terbatas, mengusahakannya untuk mengisi peluang ekonomi yang tersedia (ekspor), dan mengkonversi yang dapat dikonversikan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja hutan lokal dan kualitas SDM pengelola hutan secara

lebih memadai, menyediakan sarana dan prasarana angkutan darat dan laut, memperkuat dukungan lembaga pemerintah lokal dalam pengelolaan hutan, dan memberikan insentif yang memadai bagi investor atau pengusaha hutan, dan disinsentif bagi yang merusak atau mengancam kelestarian hutan.

b. Sektor Perkebunan

Pengembangan sektor perkebunan dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan penduduk, swasta, dan pemerintah daerah dalam menanam komoditi-komoditi unggulan yang laku di pasaran khususnya di luar daerah, dan meningkatkan kualitas komoditi tersebut agar mampu merebut pasaran. Untuk itu, perlu disiapkan pengembangan kualitas SDM yang mampu menguasai peningkatan kualitas komoditi unggulan tersebut, menyediakan sarana dan prasarana angkutan dari dan ke pelabuhan, memperkuat lembaga pemerintah yang berkecimpung di bidang perdagangan seperti koperasi unit desa, dinas perdagangan dsb., dan melindungi harga komoditi unggulan, termasuk memperlancar ijin usaha sebagai salah satu bentuk insentif bagi pengembangan sektor tersebut.

c. Sektor Perikanan

Pengembangan sektor perikanan hendaknya dilakukan dengan

melibatkan penduduk dalam peningkatan produksi ikan laut dan darat, pemanfaatan potensi laut secara lebih optimal, dan peningkatan kualitas komoditi yang laku di pasaran di luar wilayah. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi perikanan, penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan, penangkapan, pengolahan dan penyimpanan hasil-hasil yang diperoleh dan pemasaran, penyediaan fasilitas kredit dan bimbingan bagi yang membutuhkannya, melindungi harga pasar, dan membantu memperlancar ijin usaha di bidang perikanan sebagai wujud insentif yang nyata.

d. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan hendaknya dilakukan dengan membuka areal baru bagi persawahan dan ladang kering, meningkatkan produktivitas tanaman pangan agar dapat mencapai swasembada pangan, serta memenuhi kebutuhan dari luar wilayah, dan melibatkan lebih banyak penduduk dalam usaha tanaman pangan secara modern dan meninggalkan cara-cara bercocok tanam secara tradisional yang merugikan. Usaha-usaha ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran penduduk terhadap manfaat teknologi baru, melindungi harga bahan makanan, menyediakan sarana dan prasarana angkutan hasil-hasil

pertanian, membantu lembaga-lembaga pertanian lokal seperti KUD dan koperasi lainnya agar lebih mendorong dan memperlancar kegiatan pertanian dengan menyediakan fasilitas kredit, bibit-bibit unggul, dsb.

e. Sektor Peternakan

Pengembangan sektor peternakan dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan penduduk dalam memelihara dan mengusahakan ternak yang cocok dengan kondisi setempat sehingga jumlah dan kualitas produksi daging dari tahun ke tahun terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan daging dalam wilayah sekaligus memperbaiki kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan peningkatan SDM yang terlibat dalam sektor tersebut melalui training dan pendidikan singkat, bimbingan langsung, penyediaan fasilitas kredit, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, perlindungan harga daging dan bahan makanan ternak, serta memperlancar ijin usaha di bidang peternakan sebagai wujud insentif di sektor peternakan.

f. Sektor Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan secara bertahap mereorientasikan nilai-nilai sosial budaya yang lebih maju pada penduduk lokal, diperlukan pengembangan sektor pendidikan yang

lebih memadai. Pengembangan sektor pendidikan hendaknya dilakukan melalui penerapan sistem pendidikan dan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan yang telah diusulkan diatas, dan disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada sehingga dapat menjangkau lebih banyak penduduk usia sekolah khususnya pada wilayah-wilayah yang terisolir. Untuk itu, diperlukan pengembangan kualitas SDM guru agar lebih mampu mendidik dan mengajar murid dan siswa dan memiliki komitmen serta dedikasi terhadap tugas pekerjaannya, menyediakan sarana dan fasilitas bagi guru-guru dalam menjalankan tugasnya, mendorong lembaga pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, serta memberikan insentif yang lebih baik bagi guru-guru yang membaktikan dirinya pada daerah-daerah yang terpencil atau terisolir.

g. Sektor Kesehatan

Dalam rangka pengembangan kualitas SDM penduduk lokal dan orientasi sosial budaya yang lebih maju diperlukan juga pengembangan sektor kesehatan. Pengembangan di sektor kesehatan diutamakan pada peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan di semua wilayah Kabupaten, terutama pada daerah-daerah pedesaan yang terisolir atau sulit dijangkau. Untuk itu, diperlukan penambahan tenaga dokter dan medis

agar menjangkau lebih banyak penduduk, pengembangan kualitas SDM di bidang kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai agar memperlancar jangkauan pelayanan kesehatan, mendorong lembaga pemerintah di bidang kesehatan agar lebih mampu mengelola pelayanan kesehatan, dan memberikan sistim insentif yang lebih baik bagi tenaga medis dan dokter yang ingin membaktikan diri dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten tersebut, khususnya di daerah-daerah pedalaman yang terisolir.

h. Sektor Kelembagaan

Pengembangan sektor kelembagaan ditujukan kepada peningkatan kualitas kelembagan khususnya lembaga pemerintah pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Pengembangan lembaga pemerintah di masing-masing tingkatan tersebut hendaknya dilakukan melalui peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen lembaga. Untuk itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM aparat pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, dukungan dan bimbingan pengembangan organisasi dan manajemen dari lembaga yang berkompeten, dan pengembangan sistim insentif yang lebih memadai agar aparat lokal dapat menjalankan tugas pelayanan dengan lebih cepat dan lancar.

i. Sektor Sarana dan Prasarana

Pengembangan sektor sarana dan prasarana diutamakan pada pembangunan jalan raya antar kecamatan dan dengan lokasi yang terisolir, penyediaan sarana angkutan umum, penyediaan listrik, tilpon, air minum, dermaga laut, dan pasar. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan kualitas SDM yang mampu mengelola sarana dan prasarana lokal, mendukung lembaga pemerintah yang menangani sarana dan prasarana tersebut, dan memberikan insentif bagi para investor yang mengusahakan pengembangan sektor tersebut.

j. Sektor Transmigrasi dan Pemukiman

Pengembangan sektor transmigrasi dan pemukiman diutamakan pada penyediaan lahan bagi para transmigran dan pemukiman penduduk setempat. Hal ini dapat dilakukan setelah sistim kepemilikan tanah diatur secara jelas dan adil sesuai dengan keputusan masyarakat setempat, dukungan terhadap lembaga yang menangani transmigrasi dan pertanahan, menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam penataan sistim permukiman baru, dan mengatur suatu sistim insentif yang lebih baik agar penduduk luar wilayah tertarik menjadi transmigran, dan tetap tinggal disana sehingga menambah jumlah penduduk lokal.

7. Strategi Pengembangan Spasial

Strategi pengembangan spasial mencakup pengembangan wilayah-wilayah yang tergolong potensial dalam pengembangan ekonomi seperti lokasi-lokasi pengembangan sektor unggulan utama dan unggulan penunjang pada SWP Fakfak, SWP Kokas, SWP Kaimana, SWP T.Arguni, dan SWP T.Etna, dan wilayah-wilayah terisolir yang terpecah.

a. Strategi pengembangan wilayah potensial

Pengembangan wilayah-wilayah potensial dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang ada secara efisien, khususnya memanfaatkannya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan utama dan penunjang. Pemanfaatan ruang tersebut harus didukung oleh lembaga yang mampu menata ruang secara efisien dan efektif, prasarana dan sarana, serta SDM yang memadai.

b. Strategi pengembangan wilayah terisolir

Wilayah-wilayah terisolir sulit dikembangkan karena tidak efisien. Karena itu, pengembangan wilayah terisolir harus dilakukan dengan mengembangkan sistem pemukiman secara terpusat yang mudah dijangkau oleh pelayanan publik serta memiliki akses untuk berhubungan dengan

wilayah lain. Untuk itu diperlukan insentif dalam rangka memotivasi penduduk yang tinggal di daerah terisolir untuk meninggalkan tempat tinggalnya menuju pemukiman baru.

Penutup

Karena keterbatasan ruang, banyak aspek dan dimensi dari "strategic planning" yang dimanfaatkan dalam penyusunan strategi pembangunan wilayah terpadu untuk Kabupaten Fakfak, tidak dapat disajikan. Meskipun demikian, cara memanfaatkan informasi dan data dari berbagai perspektif agar mengurangi subjektivitas dalam penyusunan rencana telah disajikan secara terbuka. Partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, pemerintah lokal dan konsultan sangat bernilai, membuat rencana menjadi lebih obyektif dan transparan.

Penerapan "strategic planning" sebagai "strategic intervention" dalam pembangunan regional seperti ini merupakan suatu inisiatif dan kreativitas yang perlu dilakukan oleh para perencana karena tidak ada suatu teori pembangunan regional yang dapat dijadikan pegangan tetap dalam penyusunan rencana pembangunan regional. Mudah-mudahan ketidakmampuan teori tersebut merupakan tantangan yang akan mendorong kaum intelektual dan praktisi untuk menciptakan model yang lebih tepat sesuai dengan konteks Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azis, I.J. 1991. 'Key Issues in Indonesian Regional Development'. dalam *Unity and Diversity*. Hal.55-70. Singapore: Oxford University Press.
- Bryson M.J. 1988. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Friedmann, J. and M.Douglass. 1978. Agropolitan Development: towards a new strategy for regional planning in Asia. Dalam Lo,Fuchen and Salih, K. (eds.), *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy*. Oxford: Pergamon.
- Friedmann, J. and C.Weaver. 1979. *Territory and Function: the Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold.
- Gore, Ch. *Regions in Questions: Space, development theory and regional policy*. New York: Methuen.
- Hill, H. dan A. Weidemann. 1991. 'Regional Development in Indonesia: Patterns and Issues', dalam *Unity and Diversity*. Hal. 3-53. Singapore: Oxford University Press.
- Bappenas dan Departemen Perhubungan dan Transmigrasi. *Rencana Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT) pada Wilayah Pengembangan Fakfak, Propinsi Irian Jaya*. Laporan Akhir. Jakarta. 1997.
- Rondinelli, D.A. and Ruddle, K. 1978. *Urbanization and Rural Development: A spatial policy for equitable growth*. New York: Praeger.
- Stilwell, F. 1995. *Understanding Cities & Regions: Spatial Political Economy*. Australia: Pluto Press.